**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA PALEMBANG**

ROADMAP ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH2021-2025



# ROADMAP ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2025

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA PALEMBANG**

# Latar Belakang

* 1. **Pendahuluan**

# Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kota Palembang

Pemerintah pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, pada tanggal 19 Maret 2021 Pemerintah Kota Palembang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Walikota Nomor 64/KPTS/BPKAD/ 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Palembang. Keputusan Walikota dimaksud juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) yang akuntabel dan trasparan yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

ETP menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi nontunai (belanja dan pendapatan daerah). Di Pemerintah Kota Palembang, hampir semua transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS) dan pada tahun 2018 penerimaan pendapatan dari Wajib Pajak (WP) sudah dilakukan secara non tunai dan tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi, sedangkan untuk Wajib Retribusi (WR) sejak tahun 2018 hampir semuanya sudah melalui non tunai.

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran untuk 11 jenis pajak yang dipungut di Kota Palembang sudah dilakukan pembayaran secara non tunai melalui *channel* perbankan yang ditunjuk yaitu PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung (Mobile Banking, ATM, Edc, dsb). Sedangkan pembayaran PBB yang semula hanya menggunakan kanal *bank* telah diperluas menggunakan kanal *e- commerce* (Indomaret)
2. Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2021 sudah melakukan kerjasama dengan PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung untuk pelaksanaan pembayaran secara non tunai pada 2 jenis retribusi sebagai berikut:
   1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Kemudian Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2022 merencanakan untuk mengimplementasikan semua jenis retribusi dengan menggunakan sistem pembayaran dengan QRIS.

1. Untuk BLUD dan BUMD, tahun 2022 ditargetkan menggunakan QRIS.

# Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah

* 1. **Letak Geografis dan Luas Wilayah**

Kota Palembang terletak antara 2 o52’ sampai 3 o5’ Lintang Selatan dan 104 o37’ sampai 104 o52’ Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² / 40,061 ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat Dua merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

* 1. **IKLIM**

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2020, suhu udara maksimum terjadi pada bulan Agustus yang berkisar 36,800C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juni dan Desember yang berkisar 22,000C.Kecepatan angin hampir di seluruh wilayah Palembang merata setiap bulannya, yaitu berkisar antara 1,20 m/det hingga 2,01 m/det. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah/ kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran / pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamatan. Rata-rata curah hujan selama tahun 2020 berkisar antara 48,60 mm (Agustus) sampai 396,50 mm (April). Palembang mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2020 rata-rata berkisar antara 72,18% (Agustus) sampai 82,33% (Februari).

* 1. **LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KOTA PALEMBANG**

**B.3.1. GAMBAR**

Ilir Barat II

Gandus seberang Ulu I Kertapati Jakabaring Seberang Ulu II Plaju

Ilir Barat I Bukit Kecil Ilir Timur I Kemuning Ilir Timur II Kalidoni

Ilir Timur III

Sako

Sematang Borang Sukarami

Alang-Alang Lebar

**4.93**

**2.71 2.25 2.48**

**1.62**

**2.67**

**3.79**

**6.97**

**3.68**

**4.50**

**10.62**

**9.23**

**2.07**

**2.29**

**12.85**

**17.17**

**8.63**

**1.55**

**B.3.2. TABEL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **IBU KOTA KECAMATAN** | **LUAS** |
| 1 | Ilir Barat Dua | Dua-puluh-sembilan Ilir | 6,22 |
| 2 | Gandus | Gandus | 68,78 |
| 3 | Seberang Ulu Satu | Tiga Empat Ulu | 8,28 |
| 4 | Kertapati | Karyajaya | 42,56 |
| 5 | Jakabaring | Lima-belas Ulu | 9,16 |
| 6 | Seberang Ulu Dua | Empat-belas Ulu | 10,69 |
| 7 | Plaju | Plaju Ilir | 15,17 |
| 8 | Ilir Barat Satu | Bukitlama | 19,77 |
| 9 | Bukitkecil | Dua-puluh-enam Ilir | 9,92 |
| 10 | Ilir Timur Satu | Dua-puluh Ilir Tiga | 6,50 |
| 11 | Kemuning | Ario Kemuning | 9,00 |
| 12 | Ilir Timur Dua | Tiga Ilir | 10,82 |
| 13 | Kalidoni | Kalidoni | 27,92 |
| 14 | Ilir Timur Tiga | Delapan Ilir | 14,76 |
| 15 | Sako | Sako Baru | 18,04 |
| 16 | Sematangborang | Srimulya | 36,98 |
| 17 | Sukarami | Kebunbunga | 51,46 |
| 18 | Alang-Alang Lebar | Talangkelapa | 34,58 |
| **Palembang** | |  | **400,61** |

1. **Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Palembang pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Palembang atas dasar harga konstan 2010, mencapai 104,53 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 98,66 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94%, pertumbuhan ini naiknya lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,69%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 15,85%. Salah satu penyebabnya adalah mulai banyak penyediaan makan minum baru yang menawarkan makanan yang makin variatif serta masuknya brand-brand makanan ternama di Palembang. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,50%. Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 10% selain lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum adalah lapangan usaha Jasa Perusahan mengalami pertumbuhan sebesar 11,88%, kemudian lapangan usaha real estat dengan pertumbuhan sebesar 10,19% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan 10,05%. Lapangan usaha yang mempunyai pertumbuhan antara 5- 10% berturut-turut adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,88%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,72%, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,71%, Jasa Lainnya sebesar 7,52%, Jasa Kesehatan sebesar 6,45%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,42%, Jasa Pendidikan sebesar 5,79% dan Konsruksi sebesar 5,77%.

Sedangkan lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen bahkan mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 3,38%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,19%, lapangan usaha Pertanian sebesar 2,77%, lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,10%, serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami pertumbuhan sebesar negatif 1,50%.

Perekonomian Kota Palembang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,25%. Kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -8,08%, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,71%, dan Konstruksi sebesar -3,23%. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,06%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,92; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah sebesar 7,93%; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,98%. Pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dari tahun 2015-2019 secara rata-rata mencapai 6,01%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 6,69% dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,45%. Pada tahun 2019 Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) menjadi komponen pengeluaran terbesar, di ikuti oleh Konsumsi Rumah tangga, Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Moda Tetap Bruto (PMTB).

# Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Dilihat dari *trend* kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Palembang, menunjukkan adanya kontribusi yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 34,26 % maka 4 (empat) tahun berikutnya pada tahun 2020 sudah mencapai 33,13%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Palembang selama 5 (lima) tahun tersaji pada tabel sebagai berikut :

# Tabel 3

**Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d. 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **PAD** | **Pendapatan** | **Persentase Kontribusi** |
| 1 | 2016 | 781.413.947.765,14 | 3.122.903.127.195,01 | 25.02% |
| 2 | 2017 | 1.091.704.605.854,90 | 3.417.593.733.021,39 | 31.94% |
| 3 | 2018 | 953.302.082.627,74 | 3.485.882.634.349,88 | 27.35% |
| 4 | 2019 | 1.081.114.690.868,43 | 3.987.546.941.588,54 | 27.11% |
| 5 | 2020 | 1.032.720.967.939,99 | 3.695.470.898.063,30 | 27.95% |

Jika dilihat dari komposisi PAD Kota Palembang tahun 2020, maka kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dengan nominal Rp.787.923.892.941,00 atau menyumbang PAD sebesar 76,30%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kota Palembang Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

# Tabel 4

**Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis PAD** | **Jumlah** | **%** |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 787.923.892.941,00 | 76,30% |
| 2 | Hasil Retribusi Daerah | 35.526.389.909,00 | 3,44% |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 64.553.337.547,79 | 6,25% |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 144.717.347.542,20 | 14,01% |
|  | **Jumlah** | 1,032,720,967,939.99 | **100%** |

# Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah

Pandemi covid-19 berdampak secara signifikan pada perekonomian Kota Palembang khususnya berdampak pada sektor riil atau berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Palembang terutama pada Industri, Hotel, Restoran, tempat hiburan yang akan mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja, masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan, misalnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan atau menjual souvenir dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, dan pekerja sektor informal lainnya. Selain berdampak kepada masyarakat, juga berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang yang sebagian besar berasal dari pajak daerah.

Strategi pemulihan ekonomi Kota Palembang untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan demand bagi semua produk baik pariwisata, budaya maupun UMKM, serta penguatan konsep kebaruan (new normal) dalam kegiatan ber-ekonomi masyarakat di masa yang akan datang. Implementasi protokol Kesehatan disusun untuk semua lini kehidupan bermasyarakat dengan pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat Kota Palembang akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir Pajak daerah masih akan menjadi *key* sektor Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. Di sisi lain ketimpangan pendapatan masih mejadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palembang.

# Asesmen Ekonomi Dan Sistem Pembayaran Di Daerah

* 1. **Jaringan Komunikasi (Internet)**

# Cakupan Jaringan Dan Internet

Pemerintah Kota Palembang menyadari bahwa untuk mendukung terwujudnya elektronifikasi dan transaksi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Palembang secara bertahap membangun jaringan *fiber optic* sebagai *backbone* untuk menghubungkan kompleks balaikota dengan gedung kantor yang berada di luar. Saat ini semua SKPD Pemerintah Kota Palembang sudah terhubung ke internet dengan jaringan *fiber optic* yang dikelola secara terpusat dibawah kordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Jumlah BTS (Base Tranceiver Station) di Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang Tahun 2018-2020

Perkembangan digitalisasi hingga tahun 2020, ditandai dengan pendirian Menara BTS baru yang semakin bertambah banyak, baik di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang, sebagai upaya memaksimalkan layanan media telekomunikasi.

Jumlah Kelurahan Penerima Signal Internet Telepon Seluler di Kota Palembang

Perkembangan ekonomi digital dan layanan e-commerce (pelanggan mobile, pengguna internet dan pengguna aktif media sosial) di Kota Palembang dalam hal ini ditandai dengan mulai beralihnya penggunaan jaringan 3G/H+EVDO menjadi 4G/LTE di tahun 2020 yaitu dari 107 kelurahan, sebanyak 97 kelurahan di tahun 2019 menjadi 99 kelurahan di tahun 2020.

Jumlah Merchant Pengguna Aplikasi QRIS di Kota Palembang 2020 – 2021

Berdasarkan data tersebut bahwa penggunaan aplikasi QRIS pada merchant usaha dagang dan UMKM di Kota Palembang mengalami peningkatan dengan persentase kumulatif sebesar 13,71 persen pada bulan oktober 2021.

# Infrastruktur Perbankan

* **Bank Pengelola RKUD**

Pemerintah Kota Palembang memiliki satu bank pengelola Rekening Kas Umum daerah, yaitu PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung dan merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan Bangka dan Belitung,

* **Komposisi Modal Disetor Tahun 2020**

PT PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung saat ini memiliki aset sebesar Rp. 28.058.169.000.000,00 Pada tahun 2020, PT PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung mencetak laba tahunan sebesar Rp 153.121.000.000,00 Sedangkan pada triwulan pertama dan kedua tahun 2021, PT PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung tercatat menghasilkan laba tahun berjalan sebesar Rp 321.395.000.000,00

# Buku Bank Pengelola RKUD

PT PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung merupakan bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank BUKU 2 sejak tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, BUKU 2 adalah Bank dengan modal inti sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima trilyun rupiah). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum BUKU 2 di antaranya penghimpunan dan penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, keagenan dan kerja sama, serta sistem pembayaran dan electronic banking.

# Keberadaan CMS Dan Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung memiliki berbagai produk layanan non tunai di antaranya:

* + - * ATM : Layanan perbankan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di 468 titik di seluruh wilayah Kota Palembang.
      * Bank Sumsel Babel Mobile : Layanan mobile banking PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung untuk nasabah perorangan
      * Cash Management System (CMS) : Layanan internet banking PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara real time oleh bendahara

* + - * *Electronic Data Capture* (EDC) : Perangkat yang dapat membaca data elektronik seperti pada kartu ATM dan dapat meneruskan informasi transaksi ke sistem keuangan Bank
      * Solusi Aneka Ragam Transaksi (Saget) : Sarana pembayaran *multi-channel* (QRIS, kartu debit, uang elektronik) yang menggunakan perangkat *mobile point of sale* (MPOS)
      * Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) : Penyediaan layanan perbankan yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor, namun bekerja sama dengan pihak lain.
      * QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT) : Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) milik PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung yang memungkinkan *merchant* yang telah diakuisisi untuk melayani transaksi non-tunai melalui QR Code.

# Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD Di Wilayah Kerja Kota Palembang (ATM,EDC,Dll)

PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung saat ini memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut :

* 1 kantor pusat
* 29 Kantor Cabang
* 55.Kantor Cabang Pembantu
* 118 Kantor Kas
* 61Payment point
* 468 mesin ATM
* 1.079 mesin EDC.

# Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi kota Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang dan Bank Indonesia. Selain itu, PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kota Palembang.

Dalam rangka perluasan digitalisasi transaksi pemerintah, telah dilakukan pemetaan Jenis Retribusi dan Pajak yang sudah dan belum melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Sumsel Babel (alternatif penggunaan QRIS dan kanal lainnya) sebagai berikut:

* 1. Retribusi

|  |  |
| --- | --- |
| Telah Melaksanakan | Belum Melaksanakan |
| 1. Retribusi Pelayanan TERA / TERA ulang ( Dinas Perdagangan )  2. Retribusi Parkir di tepian jalan umum (Dinas Perhubungan)  3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) (Dinas Perhubungan) | 1. Retribusi Persampahan / Kebersihan  (DLHK)  2. Retribusi Pelayanan Pemakaman  (PRKP)  3. Retribusi Pemeriksaan Alat  Pemadam Kebakaran (DPPBK )  4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ( Dinas PUPR )  5. Retribusi Pengawasan & pengendalian menara telekomunikasi (Kominfo )  6. Retribusi Jasa Usaha ( Dinas Perdagangan )  7. Retribusi Tempat Pelelangan ( dinas Perikanan )  8. Retribusi Terminal ( Dinas Perhubungan )  9. Retribusi Rumah Potong Hewan( Dinas Pertanian )  10. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan( Dinas Perhubungan)  11. Retribusi Tempat rekreasi & Olahraga (Dispora ) (Dinas Pariwisata)  12. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah ( Dinas Koperasi )  13. Retribusi Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing ( Disnaker)  14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Dinas PUPR)  15. Retribusi Izin Trayek Kendaran Umum ( DPMPTSP) |

* 1. Pajak

|  |  |
| --- | --- |
| Telah Melaksanakan | Belum Melaksanakan |
|  | 1. Pajak Hotel  2. Pajak Restoran  3. Pajak Hiburan  4. Pajak Reklame  5. Pajak Penerangan Jalan  6. Pajak Parkir  7. Pajak Air Tanah  8. Pajak Sarang Burung Walet  9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)  11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |

# Lainnya

Melalui fasilitas perbankan digital seperti ATM, BSB Mobile, dan CMS, PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung dapat melayani transaksi digital di luar hari dan jam kerja sekalipun. Selain itu, PT PT. Bank Sumatera Selatan Bangka dan Belitung juga memiliki layanan *contact center* (1500711) yang juga beroperasi 24 jam penuh.

# Lingkungan Strategis

* + - **Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Daerah**

Pemerintah Kota Palembang mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. Antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaku UMKM di Kota Palembang melalui program Pinjaman Tanpa Bungadan tanpa anggunan
2. Bekerjasama dengan beberapa stakeholder (Bank Indonesia, PT. BSB) untuk mengajak beberapa pedagang dan UMKM berjualan online
   * + **Keberadaan Regulasi Pendukung ETP Dan *E-Government***

Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) merupakan amanat pemerintah pusat melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai, yang ditindaklanjuti Pemkot melalui

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
2. Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan

Walikota Nomor 64/KPTS/BPKAD/ 2021, tanggal 19 Maret 2021.

1. Menyusun Tim untuk mendukung proses percepatan ETP.

# Tingkat Literasi Non Tunai Dan Digital Masyarakat

Tingkat literasi Non Tunai masyarakat Kota Palembang terus berkembang terutama setelah Pemerintah Kota Palembang merealisasikan pelaksanaan transaksi nontunai untuk pengeluaran lebih dari Rp 100.000 mulai tahun 2019. Kemudian didorong juga oleh pemberlakuan sistem pembayaran nontunai untuk semua jenis pajak dan sebagian jenis retribusi.

# Kendala Dan Permasalahan Pemkot Palembang Dalam Mendorong Digitalisasi

# Daerah.

Tantangan bagi penerapan digitalisasi di Kota Palembang secara umum meliputi:

1. Kualitas data yang masih perlu ditingkatkan.
2. Infrastruktur, sistem data dan informasi yang belum terintegrasi
3. Awareness dan literasi keuangan digital masyarakat yang relatif masih rendah.

# Rencana Kerja Perluasan ETP 2021-2025

1. Meningkatnya Pemahaman Pegawai SKPD Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
2. Meningkatnya Literasi Digital Dan Nontunai Masyarakat
3. Meningkatnya Perluasan Dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda
4. Meningkatnya Transaksi Non Tunai Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Penerimaan Asli Daerah
5. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
7. Mencapai/Mempertahankan Opini WTP